



Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Laporan Keuangan Satker (Audited)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 2
Pekanbaru



(0761) - 866 5567



kota_pekanbaru@kpu.go.id



<https://kotapekanbaru.kpu.go.id/>

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Kota Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kota Pekanbaru. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, 6 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

ATIKA VERINA
NIP. 198409232009122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	28
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
F. Pengungkapan Penting Lainnya	34
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Kota Pekanbaru yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pekanbaru, 6 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,


ATIKA VERINA

NIP. 198409232009122001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Per 31 Desember Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA. 2024 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp17.352.800,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA. 2024 adalah sebesar Rp 96.925.141.305,- atau mencapai 84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp115.133.459.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp19,035,951,098,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 18,440,683,641,-; Aset Tetap (netto) sebesar Rp580,595,638,-; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp14.431.485,- dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp240.334,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp19,035,951,098,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0.00,- sedangkan Jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp103,453,726,207,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(103,453,726,207),-. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar

Rp309,650,880,- dan Pos Luar Biasa sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Deficit-LO sebesar Rp(103,144,075,327),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp3.079.791.691,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(103,144,075,327),- ditambah dengan Koreksi nilai persediaan sebesar Rp0,-, koreksi nilai aset non revaluasi sebesar Rp(304.200.000),-; Koreksi lain-lain senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp118.689.610.746,- Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp15,241,335,419,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp18,321,127,110,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2024		% thd Angg	TA. 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	AI.1.b	0	17.352.800	0,00	17.646.907
JUMLAH PENDAPATAN		0	17.352.800	0,00	17.646.907
BELANJA	B				
Belanja Pegawai	B.I.1.a	2.836.910.000	2.824.786.767	99,57	2.494.210.980
Belanja Barang	B.I.1.b	111.626.649.000	93.796.154.538	84,03	23.877.416.544
Belanja Modal	B.I.1.c	669.900.000	304.200.000	0,00	293.630.000
Belanja Bantuan Sosial	B.I.1.d	0	0	0,00	0
JUMLAH BELANJA		115.133.459.000	96.925.141.305	84,19	26.665.257.524

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Kas Lainnya dan setara Kas		18.125.683.641	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		315.000.000	855.000.000
Piutang Bukan Pajak		-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		-	-
Persediaan		-	1.874.086.246
Jumlah Aset Lancar		18.440.683.641	2.729.086.246
ASET TETAP			
Tanah		-	-
Peralatan dan Mesin		2.355.618.315	1.995.618.315
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan Irigasi dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya		-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.775.022.677)	(1.584.631.614)
Jumlah Aset Tetap		580.595.638	410.986.701
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR		14.504.005	20.217.925
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-TGR		(72.520)	(101.090)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		14.431.485	20.116.835
Jumlah Piutang Jangka Panjang		14.431.485	20.116.835
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud		-	-
Aset Lain-lain		523.360.525	523.360.525
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya		(523.120.191)	(523.051.524)
Jumlah Aset Lainnya		240.334	309.001
JUMLAH ASET		19.035.951.098	3.160.498.783
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga		714.823.988	80.707.092
Jumlah Kewajiban		714.823.988	80.707.092
EKUITAS			
Ekuitas		18.321.127.110	3.079.791.691
JUMLAH EKUITAS		18.321.127.110	3.079.791.691
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.035.951.098	3.160.498.783

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	1.309.122
JUMLAH PENDAPATAN		-	1.309.122
BEBAN			
Beban Pegawai		2.759.571.151	2.492.811.533
Beban Persediaan		7.139.373.478	5.072.000
Beban Barang dan Jasa		82.211.665.301	20.305.245.660
Beban Pemeliharaan		71.627.762	256.247.445
Beban Perjalanan Dinas		11.081.057.355	1.697.827.018
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi		190.459.730	121.143.518
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(28.570)	(28.569)
JUMLAH BEBAN		103.453.726.207	24.878.318.605
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(103.453.726.207)	(24.877.009.483)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non lancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		309.650.880	10.623.865
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		315.838.880	10.623.865
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya		6.188.000	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		309.650.880	10.623.865
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(103.144.075.327)	(24.866.385.618)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(103.144.075.327)	(24.866.385.618)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	3.079.791.691	197.996.343
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(103.144.075.327)	(24.868.385.618)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	- 304.200.000	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.4	-	-
Koreksi Nilai Non Revaluasi	E.3.5	- 304.200.000	-
Koreksi Lain-lain	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	118.689.610.746	27.748.180.966
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		15.241.335.419	2.881.795.348
EKUITAS AKHIR	E.5	18.321.127.110	3.079.791.691

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan Tata Kerja Entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Datuk Setia Maharaja No. 2 Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berkomitmen dengan visi **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Untuk mewujudkan akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;

- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 September Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan akuntansi dan pelaporan berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Dasar
Pengukuran**

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam penyusunan

dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat

keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan	100%

	pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 Tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi berdasarkan PMK No.18 tahun 2016 sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman	20

Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset lain-lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kode kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber jenis belanja sebagai berikut :

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.511.340.000	2.836.910.000
Belanja Barang	53.831.709.000	111.626.649.000
Belanja Modal	669.900.000	669.900.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Pinjaman dan Hibah	-	-
Jumlah Belanja	57.012.949.000	115.133.459.000

Realisasi
Pendapatan
Rp17.352.800,-

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.352.800,-. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut berupa penyetoran atas tindak lanjut temuan PDTT pada tahun 2014.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	%Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	17.352.800	-
Jumlah	-	17.352.800	-

Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp Rp17.352.800,- dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0.00 Pendapatan Negara dan Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru terdiri dari Penerimaan

Perpajakan, **Penerimaan Negara Bukan Pajak**. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

***Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2024 dan 2023***

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA. 2023	%Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	17.352.800	17.646.907	0,98
Jumlah	17.352.800	17.646.907	0,98

**Realisasi
Belanja Negara
Rp96.925.141.305,-**

B.2. Belanja

Realisasi belanja Instansi untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp96.925.141.305,- atau 84% dari Anggaran senilai Rp115.133.459.000,- Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA. 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	%Real Angg.
Belanja Pegawai	2.836.910.000	2.824.786.767	99,57
Belanja Barang	111.626.649.000	93.796.154.538	84,03
Belanja Modal	669.900.000	304.200.000	0,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Pinjaman dan Hibah	-	-	-
Total Belanja Netto	115.133.459.000	96.925.141.305	84,19
Pengembalian	-	-	
Jumlah	115.133.459.000	96.925.141.305	84,19

Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024, Realisasi Belanja yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan karena terdapatnya belanja barang dan pembayaran honor badan Ad Hoc untuk Pemilu Tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja
periode 31 Desember 2024 dan 2023*

Uraian	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA. 2023	%Real Angg.
Belanja Pegawai	2.824.786.767	2.494.210.980	88,30
Belanja Barang	93.796.154.538	23.877.416.544	25,46
Belanja Modal	304.200.000	293.630.000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	96.925.141.305	26.665.257.524	27,51

Belanja Pegawai
Rp 2.824.786.767,-

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.824.786.767,- dan Rp2.494.210.980,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan dikarenakan adanya kenaikan pangkat dan pembayaran gaji serta tunjangan PPPK dilingkungan Sekretariat KPU Kota Pekanbaru.

Perbandingan Belanja Pegawai
Semester II TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA. 2023	Naik (Turun)%
Belanja Gaji Pokok PNS	844.302.600	699.955.800	82,90
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.216	13.051	106,84
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	64.912.070	52.757.220	81,27
Belanja Tunj. Anak PNS	20.591.042	17.867.296	86,77
Belanja Tunj. Struktural PNS	30.240.000	35.280.000	116,67
Belanja Tunj. Fungsional PNS	6.300.000	6.300.000	
Belanja Tunj. PPh PNS	6.059.346	1.903.264	0,00
Belanja Tunj. Beras PNS	50.694.000	45.914.280	90,57
Belanja Uang Makan PNS	118.198.000	116.751.000	98,78
Belanja Tunj. Umum PNS	30.950.000	25.250.000	81,58
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	769.940.279	812.730.500	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	28.832.400	-	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	437	-	
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	2.883.240	-	
Belanja Tunj. Anak PPPK	1.153.296	-	
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	4.860.000	-	
Belanja Tunj. Beras PPPK	2.607.120	-	
Belanja Makan PPPK	3.293.000		
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	866.651.078	679.488.682	78,40
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	29.520.661		
Jumlah Belanja	2.882.000.785	2.494.211.093	86,54
Pengembalian Belanja Pegawai	698	113	-
Pengembalian Belanja UK Pejabat Negara	57.213.320		
Jumlah Belanja	2.824.786.767	2.494.210.980	88,30

Belanja Barang
Rp93,796,154,538,-

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp93.796.154.538,- dan Rp23.877.416.544,-. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami kenaikan, hal ini antara lain disebabkan pada TA. 2024 terdapat belanja barang untuk menunjang keperluan kegiatan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang
Semester II TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA. 2023	Naik (Turun)%
Belanja Keperluan Perkantoran	71.996.200	26.951.400	37,43
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	99.914.000	138.300.000	138,42
Belanja sewa	45.447.000	1.025.575.000	2256,64
Belanja Bahan	10.569.226.549	1.538.385.535	14,56
Belanja Honor Output Kegiatan	42.762.807.000	15.345.400.000	35,88
Belanja Barang Operasional Lainnya	44.200.000	20.997.000	0,00
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 19	-	16.000.000	
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.511.725.253	763.291.421	0,00
Belanja jasa profesi	96.500.000	16.200.000	
Belanja Jasa Lainnya	5.221.098.085	165.976.216	3,18
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.239.650	74.623.590	663,93
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.388.112	181.428.855	300,44
Belanja Perjalanan Biasa	1.115.411.186	298.510.963	26,76
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	788.735.000	241.047.500	0,00
Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting Luar Ko	737.046.669	503.502.555	68,31
Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting Dlm Kot	8.443.892.500	654.766.000	0,00
Belanja Barang Non Operasional lainnya	22.221.123.734	2.866.460.509	0,00
Jumlah Belanja Kotor	93.800.750.938	23.877.416.544	25,46
Pengembalian Belanja Bahan	248.400		
Pengembalian Belanja Perjadiin Biasa	340.000		
Pengembalian Belanja Perjadiin Dalam Kota	2.040.000		
Pengembalian Belanja Perjadiin Pkt Meeting Dalam Kota	1.000.000		
Pengembalian Belanja Perjadiin Pkt Meeting Luar Kota	968.000	-	0,00
Jumlah Belanja Bersih	93.796.154.538	23.877.416.544	25,46

Belanja Modal **B.4. Belanja Modal**

Rp.304.200.000,- Realisasi Belanja Modal Semester II TA. 2024 dan TA. 2023 adalah masing-masing sebesar Rp304.200.000,- dan Rp293.630.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan Kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya & Setara
Kas
Rp18.125.683.641,-

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18.125.683.641,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas atas: Dana Hibah yang masih ada di rekening bank Bendahara hingga tanggal neraca; dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait, investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester II 2024 dan 2023

Uraian	TA. 2024	TA. 2023
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	18.125.683.641	-
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	18.125.683.641	-

Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp315.000.000,-

C.3. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja dibayar dimuka (prepaid) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp315.000.000,- dan Rp855,000,000,-. Belanja dibayar dimuka pada TA. 2023 merupakan biaya sewa gudang logistik KPU Kota Pekanbaru. Jangka waktu kontrak gudang tersebut selama 22 (dua puluh dua bulan) yang dimulai bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan Agustus tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp990.000.000,-.

Peralatan dan
Mesin
Rp2,355,618,315,-

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp2.355.618.315,- dan Rp1,995,618,315,- Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.701.988.315
Mutasi Tambah :	-
Pembelian	-
Hibah Barang	-
Koreksi Tambah	-
Mutasi Kurang :	653.630.000
Penghentian dari Penggunaan	653.630.000
Saldo per 31 Desember 2024	2.355.618.315
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	1.775.022.677
Nilai Buku per 31 Desember 2024	580.595.638

Piutang Bukan Pajak
Rp0,-

C.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak Semester II TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(1,775,022,677),-

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp(1,775,022,677),- dan Rp(1.584.631.614),- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.355.618.315	1.775.022.677	580.595.638
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	2.355.618.315	1.775.022.677	580.595.638

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka
Panjang
Rp14.431.485,-

C.7. Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang jangka panjang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.431.485,- dan Rp20.116.835,-.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada KPU Kota Pekanbaru merupakan Piutang TP/TGR.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp14.504.005,-

C.7.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.504.005,- dan Rp20.217.925,-.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR Rp(72.520),-

C.7.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp(72.520) dan Rp(101.090).
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Aset Lainnya Rp240.334,-

C.8. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp240.334,- dan Rp309.001,-.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Lain-lain Rp523.360.525,-

C.8.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp523.360.525,- dan Rp523.360.525,-. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	523.360.525
Mutasi Tambah :	-
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang :	-
- Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- Penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2024	523.360.525
Akumulasi Penyusutan	- 523.120.191
Nilai Buku per 31 Desember 2024	240.334

Rincian Aset lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

**Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(523.120.191),-**

C.8.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp(523.120.191),- dan Rp(523,051,524),-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	523.360.525	(523.120.191)	240.334
Jumlah	523.360.525	(523.120.191)	240.334
Jumlah	523.360.525	(523.120.191)	240.334

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Kewajiban Jangka
Pendek
Rp714,823,988,-**

C.9. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp714,823,988,- dan Rp80.707.092,-.

**Uang Muka dari KPPN
Rp0,-**

C.9.1 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

**Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp714,823,988,-**

C.9.2 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp714,823,988,- dan Rp80.707.092,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp0,

C.9.3 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan transaksi Bendahara Pengeluaran belum diRPP dan belum diterbitkan SPMnya.

Ekuitas
Rp18,321,127,110,-

C.10. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18,321,127,110,- dan Rp3.079.791.691,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp0.00,-

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.00,- dan Rp0.00,-

Beban Pegawai
Rp2.759.571.151,-

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.759.571.151,- dan Rp2.492.811.533,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
Semester II TA 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA. 2023	Naik (Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	844.302.600	699.955.800	82,90
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.518	12.938	112,33
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	64.912.070	52.757.220	81,27
Beban Tunj. Anak PNS	20.591.042	17.867.296	86,77
Beban Tunj. Struktural PNS	30.240.000	35.280.000	116,67
Beban Tunj. Fungsional PNS	6.300.000	6.300.000	100,00
Beban Tunj. PPh PNS	6.059.346	1.903.264	0,00
Beban Tunj. Beras PNS	50.694.000	45.914.280	90,57
Beban Uang Makan PNS	109.316.000	116.862.000	106,90
Beban Tunj. Umum PNS	30.950.000	25.250.000	81,58
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	712.726.959	812.730.500	-
Beban Gaji Pokok PPPK	28.832.400		
Beban Pembulatan Gaji PPPK	437		
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	2.883.240		
Beban Tunj. Anak PPPK	1.153.296		
Beban Tunj. Fungsional PPPK	4.860.000		
Beban Tunj. Beras PPPK	2.607.120		
Beban Uang makan PPPK	3.293.000		
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Keg./Kinerja)	810.317.462	677.978.235	
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Keg./Kinerja PPPK	29.520.661		0,00
Jumlah Beban	2.759.571.151	2.492.811.533	90,33
Pengembalian Beban Pegawai	-	-	-
Jumlah Beban	2.759.571.151	2.492.811.533	90,33

Beban Persediaan
Rp7,139,373,478,-

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7,139,373,478,- dan Rp5.072.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Beban Persediaan	TH. 2024	TH. 2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	24.804.000	5.072.000	-
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	7.114.569.478	-	-
Jumlah Beban Persediaan	7.139.373.478	5.072.000	-

Beban Barang dan Jasa
Rp82,211,665,301,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp82,211,665,301,- dan Rp20.305.245.660,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang Operasional, Non Operasional dan Belanja Jasa serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Rincian Beban Barang & Jasa
Semester II TA 2024 dan 2023*

Uraian	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	71.996.200	26.951.400	37,43
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	99.914.000	138.300.000	138,42
Beban Barang Operasional Lainnya	44.200.000	20.997.000	47,50
Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19	-	16.000.000	0,00
Beban Bahan	10.986.309.282	1.538.385.535	14,00
Beban Honor Output Kegiatan	42.844.527.000	15.345.400.000	35,82
Beban Barang Non Operasional lainnya	22.221.123.734	2.866.460.509	
Beban jasa profesi	96.500.000	16.200.000	
Beban Sewa	607.947.000	170.575.000	
Beban Jasa Lainnya	5.239.148.085	165.976.216	3,17
Jumlah	82.211.665.301	20.305.245.660	24,70

Beban Pemeliharaan
Rp71.627.762,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp71.627.762,- dan Rp256.247.445,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban	TH. 2024	TH. 2023	%
Beban Pemeliharaan gedung & bangunan	11.239.650	74.623.590	(84,94)
Beban Pemeliharaan peralatan dan mesin	60.388.112	181.428.855	(66,72)
Beban persediaan bahan utk pemeliharaan	-	195.000	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	71.627.762	256.247.445	(72,05)

Beban Perjalanan Dinas
Rp11.081.057.355,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.081.057.355,- dan Rp1.697.827.018,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Jenis Beban Perjalanan Dinas	TH. 2024	TH. 2023	NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.115.071.186	298.510.963	816.560.223
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	786.695.000	241.047.500	545.647.500
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.443.212.500	654.766.000	7.788.446.500
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	736.078.669	503.502.555	232.576.114
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	11.081.057.355	1.697.827.018	9.383.230.337

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp190,459,730,-

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutasn dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp190,459,730,- dan Rp121.143.518,-. Baban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable Assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk

mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Rincian beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	TH. 2024	TH. 2023	NAIK (TURUN)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	190.391.063	121.074.851	69.316.212	57,25
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	68.667	68.667	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	190.459.730	121.143.518	69.316.212	57,22

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp(28.570),-

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih untuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(28.570),- dan Rp(28.569),-. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp309.650.880,-

D.9. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	TH. 2024	TH. 2023	%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	309.650.880	10.623.865	2.814,67
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	309.650.880	10.623.865	2.815

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).

Pos Luar Biasa
Nihil

D.10. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
Ekuitas Awal Rp3.079.791.691,-	E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.079.791.691,- dan Rp197.996.343,-.
Surplus (Defisit) LO Rp(103.144.075.327), -	E.2. Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(103.144.075.327),- dan Rp(24.866.385.618),-. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0,-	E.3. Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi Nilai Persediaan adalah penyesuaian terhadap pencatatan jumlah atau nilai persediaan barang.
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp(304.200.000),-	E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(304.200.000),- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
Transaksi Antar Entitas Rp118.689.610.746 ,-	E.4. Transaksi Antar Entitas Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp118.689.610.746,- dan Rp27.748.180.966,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	TH. 2024	TH. 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	59.036.136.196	26.665.257.524
Diterima dari Entitas Lain	17.352.800	(17.646.907)
Transfer Keluar	384.957.047	-
Transfer Masuk	4.041.095.647	1.100.570.349
Pengesahan Hibah Langsung	56.014.688.750	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-	-

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/
Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga per 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp59.036.136.196,- sedangkan DDEL sebesar Rp17.352.800,-.

Kenaikan/Penurunan
Ekuitas
Rp15,241,335,419,-

E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp15,241,335,419,- dan Rp2.881.795.348.

Ekuitas Akhir
Rp18,321,127,110,-

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18,321,127,110,- dan Rp3.079.791.691,-.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelola Keuangan Dan Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan Dan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

NO	NAMA LAMA	NAMA BARU	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ATIKA VERINA	-	Plt. Sekretaris KPU Kota Pekanbaru	KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
2.	AYATULLAH KOMEINI	-	Pelaksana pada Subbag Hukum dan SDM	PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Anggaran Rutin APBN
3.	PRIMADECY YOSALEN	-	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (KUL)	PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar)
4.	RIZKI ALHASBI	SONI MANITA	Pelaksana pada Subbag KUL	Bendahara Pengeluaran Rutin APBN
5.	REZA FAKHRUROZI	-	Pelaksana pada Subbag KUL	Staf Pengelola Keuangan
6.	SONI MANITA	FAHMI RAMADHAN	Tenaga Adm pada Subbag KUL	Staf Pengelola Keuangan
7.	YENNI RAHMAWATI	-	Pelaksana pada Subbag KUL	PPBJ (Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa)
8.	-	RIZKI ALHASBI	Pelaksana pada Subbag KUL	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Hibah Pilkada
9.	-	MUHAMMAD ASRI FADHLY	Pelaksana pada Subbag KUL	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

F.2.1 DIPA

Nomor DIPA	: DIPA-076.01.656361/2024
Tanggal DIPA	: 6 Desember 2023
Pagu Awal	: Rp56.343.049.000
Pagu Akhir s.d 31 Desember 2024	: Rp115.133.459.000

Sampai dengan periode 31 Desember 2024 KPU Kota Pekanbaru telah melaksanakan Revisi DIPA sebanyak 15 (lima belas) kali.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU
SATUAN KERJA : (656361) KPU KOTA PEKANBARU

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:51 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,309,122	(1,309,122)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	1,309,122	(1,309,122)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	1,309,122	(1,309,122)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,759,571,151	2,492,811,533	266,759,618	10.701
Beban Persediaan	7,139,373,478	5,072,000	7,134,301,478	140,660.518
Beban Barang dan Jasa	82,211,665,301	20,305,245,660	61,906,419,641	304.879
Beban Pemeliharaan	71,627,762	256,247,445	(184,619,683)	(72.047)
Beban Perjalanan Dinas	11,081,057,355	1,697,827,018	9,383,230,337	552.661
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU
SATUAN KERJA : (656361) KPU KOTA PEKANBARU

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:51 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	190,459,730	121,143,518	69,316,212	57.218
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(28,570)	(28,569)	(1)	0.004
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	103,453,726,207	24,878,318,605	78,575,407,602	315.839
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(103,453,726,207)	(24,877,009,483)	(78,576,716,724)	315.861
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	309,650,880	10,623,865	299,027,015	2,814.673
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	315,838,880	10,623,865	305,215,015	2,872.919
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,188,000	0	6,188,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	309,650,880	10,623,865	299,027,015	2,814.673
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(103,144,075,327)	(24,866,385,618)	(78,277,689,709)	314.793
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(103,144,075,327)	(24,866,385,618)	(78,277,689,709)	314.793

Keterangan :
FINAL

Pekanbaru, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



[Handwritten signature]

ATIKA VERINA

Penata TK.I 198409232009122001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA PEKANBARU 656361

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:52 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	17,352,800	17,352,800	0	0	17,646,907	17,646,907	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	17,352,800	17,352,800	0	0	17,646,907	17,646,907	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	17,352,800	17,352,800	0	0	17,646,907	17,646,907	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	115,133,459,000	96,925,141,305	(18,208,317,695)	84.19	27,809,507,000	26,665,257,524	(1,144,249,476)	95.89
1. Belanja Pegawai	2,836,910,000	2,824,786,767	(12,123,233)	99.57	2,494,252,000	2,494,210,980	(41,020)	100
2. Belanja Barang	111,626,649,000	93,796,154,538	(17,830,494,462)	84.03	25,003,231,000	23,877,416,544	(1,125,814,456)	95.5
3. Belanja Modal	669,900,000	304,200,000	(365,700,000)	45.41	312,024,000	293,630,000	(18,394,000)	94.1
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**

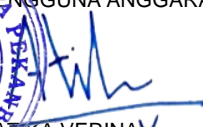



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA PEKANBARU 656361

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:52 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	115,133,459,000	96,925,141,305	(18,208,317,695)	84.19	27,809,507,000	26,665,257,524	(1,144,249,476)	95.89
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Pekanbaru, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

ATIKA VERINA
Penata Tk.I 198409232009122001



SEKRETARIAT

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU
SATUAN KERJA : (656361) KPU KOTA PEKANBARU

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:53 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	18,125,683,641	0	18,125,683,641	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	315,000,000	855,000,000	(540,000,000)	(63.16)
Persediaan	0	1,874,086,246	(1,874,086,246)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	18,440,683,641	2,729,086,246	15,711,597,395	575.71
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,355,618,315	1,995,618,315	360,000,000	18.04
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,775,022,677)	(1,584,631,614)	(190,391,063)	12.01
JUMLAH ASET TETAP	580,595,638	410,986,701	169,608,937	41.27
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	14,504,005	20,217,925	(5,713,920)	(28.26)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(72,520)	(101,090)	28,570	(28.26)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	14,431,485	20,116,835	(5,685,350)	(28.26)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	14,431,485	20,116,835	(5,685,350)	(28.26)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	523,360,525	523,360,525	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(523,120,191)	(523,051,524)	(68,667)	0.01
JUMLAH ASET LAINNYA	240,334	309,001	(68,667)	(22.22)
JUMLAH ASET	19,035,951,098	3,160,498,783	15,875,452,315	502.31
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	714,823,988	80,707,092	634,116,896	785.70
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	714,823,988	80,707,092	634,116,896	785.70
JUMLAH KEWAJIBAN	714,823,988	80,707,092	634,116,896	785.70
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	18,321,127,110	3,079,791,691	15,241,335,419	494.88
JUMLAH EKUITAS	18,321,127,110	3,079,791,691	15,241,335,419	494.88
JUMLAH EKUITAS	18,321,127,110	3,079,791,691	15,241,335,419	494.88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19,035,951,098	3,160,498,783	15,875,452,315	502.31

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU
SATUAN KERJA : (656361) KPU KOTA PEKANBARU

Tgl Data : 06/05/25 8:19 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:53 PM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

Pekanbaru, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ATIKA VERINA

★ Penata TK.I 198409232009122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0900) RIAU
SATUAN KERJA : (656361) KPU KOTA PEKANBARU

Tgl Data : 06/05/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 12:52 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	3,079,791,691	197,996,343	2,881,795,348	1,455.48
SURPLUS/DEFISIT-LO	(103,144,075,327)	(24,866,385,618)	(78,277,689,709)	314.79
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(304,200,000)	0	(304,200,000)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(304,200,000)	0	(304,200,000)	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	118,689,610,746	27,748,180,966	90,941,429,780	327.74
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	15,241,335,419	2,881,795,348	12,359,540,071	428.88
EKUITAS AKHIR	18,321,127,110	3,079,791,691	15,241,335,419	494.88

Keterangan :
FINAL

Pekanbaru, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ATIKA VERINA

Penata TK.I 198409232009122001